



STRATEGI PENGELOLAAN **BUM DESA** BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Idah Wahidah, M.H., M.A.P



STRATEGI PENGELOLAAN BUM DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Idah Wahidah, M.H., M.A.P

STRATEGI PENGELOLAAN BUM DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penulis:
Idah Wahidah

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dian Herdiana

ISBN:
978-623-459-320-4

Cetakan Pertama:
Januari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
Telepon (022) 87355370

PRAKATA PENULIS

Rasa syukur yang sangat mendalam karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Strategi Pengelolaan BUM Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Harapan besar penulis, buku ini dapat memberikan sumbangsih perkembangan keilmuan dan menjadi rujukan bagi pembaca dalam menambah wawasan dalam memahami upaya pengelolaan BUM Des melalui pelibatan masyarakat.

Penulis mengakui tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap besar dan sangat terbuka untuk menerima masukan atau kritikan yang bersifat membangun. Hal tersebut sangat diharapkan agar penulis terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya-karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan ikut berkontribusi dalam rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini bisa memberikan kebermanfaatan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia khususnya terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Januari, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BUM DESA	1
A. Pengantar	1
B. Tinjauan Para Ahli.....	4
BAB 2 KONSEP DAN TEORI PENGELOLAAN BUM DESA	7
A. Badan Usaha Milik Desa	7
B. Pendirian Bum Des	9
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	11
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERCONTOHAN BUM DESA	15
A. Profil Bum Des Kabupaten Sumedang.....	15
B. Kondisi Geografis Kabupaten Sumedang	20
BAB 4 PENERAPAN PENGELOLAAN BUM DESA	29
A. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Bum Des	29
B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bum Des	32
C. Rancang Pengelolaan Bum Des	43
BAB 5 PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran Pandang.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
PROFIL PENULIS	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Maksud dan Tujuan BUM Des	8
Tabel 3.1. Data Penghasilan BUM Des Per- Kecamatan Tahun 2021.....	19
Tabel 3.2. Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kab. Sumedang.....	21
Tabel 3.3. Klasifikasi Curah Hujan di Kabupaten Sumedang	22
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kab. Sumedang	24
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang tahun 2015-2020	29
Tabel 4.2. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Berdasarkan Renstra 2018-2023..	31
Tabel 4.3. Faktor Pengaruh Penyelenggaraan BUM Des.....	34
Tabel 4.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendirian BUM Des....	37
Tabel 4.5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan BUM Des	40
Tabel 4.6. Tahapan Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan BUM Des	46
Tabel 4.7. Tahapan Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pengelolaan BUM Des	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kategori BUM Des Kabupaten Sumedang Tahun 2022	3
Gambar 3.1. Klasifikasi BUM Des	18
Gambar 3.2. Peta Administrasi Kabupaten Sumedang	20
Gambar 3.3 . Peta Kemiringan Lahan di Kab. Sumedang	22
Gambar 3.4. Penduduk Kab. Sumedang Berdasarkan Umur	25
Gambar 3.5. Klasifikasi Penduduk berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	26
Gambar 3.6. Rasio Penduduk Ber-KTP di Kab. Sumedang	27
Gambar 4.1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pendirian BUM Des Kab. Sumedang	31
Gambar 4.2. Strategi Pengelolaan BUM Des Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	36
Gambar 4.3. Rancang Bangun Pengelolaan BUM Des Berbasis Masyarakat	43



GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BUM DESA

A. PENGANTAR

Desa dilihat dalam struktur pemerintahan merupakan bentuk pemerintahan terbawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah Desa tidak hanya berkewajiban untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat Desa, tetapi juga berkewajiban mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera (Kushandajani, 2015). Berdasarkan kepada hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk menyusun kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh desa harus senantiasa ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi merupakan salah satu kebijakan yang harus diwujudkan oleh pemerintah desa yang mana pembangunan ekonomi di tingkat Desa, dianggap akan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui produktivitas dengan harapan dapat meningkatkan masyarakat Desa yang sejahtera. Dengan begitu pemerintah Desa berfungsi sebagai pemerintah yang langsung dihadapkan dengan masyarakat dan harus mampu menjalankan peranannya dengan baik (Eko, 2014; Jaya, Muhtar, & Darto, 2021).

Pendirian BUM Des merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa untuk membangun ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Ramadana, Ribawanto, & Suwondo, 2013). Hadirnya BUM Des diharapkan menjadi simbol perekonomian suatu Desa yang tidak hanya menjadi ciri dan karakteristik dari Desa yang mampu mensejahterakan masyarakat, tetapi juga



KONSEP DAN TEORI PENGELOLAAN BUM DESA

A. BADAN USAHA MILIK DESA

BUM Des (Badan Usaha Milik Desa) merupakan suatu badan usaha melalui pemerintahan level Desa dalam pengelolaannya dan masyarakat ikut terlibat dengan tujuan memperkuat perekonomian. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUM Des secara keseluruhan atau sebagian modalnya bersumber dari desa melalui penyertaan secara langsung dan sumber tersebut dari Desa yang kekayaan dipisahkan, hal tersebut dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut (Wahyudi, 2016), BUM Des merupakan lembaga usaha yang dimiliki desa dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat, dilakukan untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian Desa dan dari segi sosial yaitu menciptakan kedekatan dengan masyarakat yang dibentuk berdasarkan aspek kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Hadirnya BUM Des diharapkan berfungsi membangun dan mengembangkan perekonomian melalui pengembangan usaha-usaha yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan (*profit*) (Republik Indonesia, 2021; Ridwansyah, Hastuti, Heriberta, Syaparuddin, & Emilia, 2021).

BUM Des diyakini dapat membantu masyarakat dan Desa dalam melakukan pengembangan potensi Desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai peluang usaha, dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat dan untuk memahami peranannya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki Desa (Hasan & Gusnardi, 2018). Pada umumnya keberadaan BUM Des bertujuan menciptakan Desa yang mandiri dan memperkuat perekonomian desa demi



GAMBARAN UMUM PERCONTOHAN BUM DESA

A. PROFIL BUM DES KABUPATEN SUMEDANG

BUM Des di Kabupaten Sumedang berjumlah 270 dari 270 Desa dengan klasifikasi berbeda, adapun klasifikasi ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Des menjalankan bisnis atau *social business* secara sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayahnya untuk memperoleh keuntungan finansial. Adapun unit usaha BUM Des di Kabupaten Sumedang meliputi air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. BUM Des dapat menjalankan bisnisnya berupa penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ada di Desa dan berkontribusi terhadap pendapatan asli Desa.

Unit usaha BUM Des di Kabupaten Sumedang sangat beragam, diantaranya kegiatan usaha di bidang penyewaan alat transportasi, perkakas atau alat pesta, gedung serbaguna untuk pertemuan atau kegiatan lain, toko, tanah milik BUM Desa dan beberapa sewaan lainnya. Selain itu, BUM Des banyak juga menjalankan usaha perantara dengan memberikan jasa layanan kepada masyarakat. Unit usaha perantaranya meliputi jasa pembayaran listrik, pasar Desa untuk memfasilitasi beberapa produk hasil karya masyarakat dan beberapa jasa pelayanan lainnya. BUM Des di Sumedang selain bisnis di bidang penyewaan dan perantara juga menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang untuk kebutuhan masyarakat atau yang lingkup pasar lebih besar. Unit usaha BUM Des di Sumedang yang sudah berjalan diantaranya



BAB 4

PENERAPAN PENGELOLAAN BUM DESA

A. PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BUM DES

Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa secara umum sudah terealisasi dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang tahun 2015-2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	283	277	277	277	277	277
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	309	303	303	303	277	277
3	Presentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100
4	Posyandu Aktif	1.661	1.641	1.641	1.641	1.641	1.692
5	Cakupan pembinaan lembaga adat	0	1	1	1	9	9
6	Presentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	18	22	25	30	20	100
7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (Kecamatan)	24	24	24	24	24	26



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya terdapat beberapa poin penting sekaligus menjadi perhatian utama, diantaranya:

1. Eksistensi BUM Des di Kabupaten Sumedang terdiri dari 270 BUM Des dari 270 Desa, dengan klasifikasi dasar, berkembang, maju dan mandiri berdasarkan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Secara praktis, peran BUM Des di tingkat desa telah memberi kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang mana BUM Des selain menjadi bagian dari ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dalam prakteknya pengelolaan BUM Des yang ada di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik yang mana BUM Des telah berhasil dikelola dengan baik meskipun terdapat tantangan yang perlu disikapi sebagai upaya perbaikan pengelolaan BUM Des di masa yang akan datang.
2. Proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUM Des yang ada di Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik yang mana masyarakat dilibatkan dari proses awal perencanaan BUM Des sampai dengan pengelolaan BUM Des, keterlibatan ini menjadi bukti bahwa BUM Des yang ada di Kabupaten Sumedang telah mempraktekan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Des, peran serta masyarakat dalam pengelolaan BUM Des di tiap-tiap desa masih berbeda yang mana ada BUM Des yang sudah membuka seluas-luasnya pengelolaan BUM Des kepada masyarakat mulai dari pengelolaan manajemen BUM Des sampai dengan pengelolaan keuangan BUM Des, namun di beberapa BUM Des

DAFTAR PUSTAKA

- (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Lau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Andrayani, K. P. (2021). Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. *Jurnal Kertha Negara*, 9(5), 336–377.
- Anwas M. Oos, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Alfabeta. Bandung. Bupati Nomor 22, P. peraturan Bupati Nomor 22 (2018).
- DES) Kasus di BUM DES Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 348–359.
- Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191.
- Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fauzy, A. L., Bahri, A. S., Sudrajat, A. R., Meilina, D., & Haq, M. S. (2019). Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekarmukti Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang. In *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* (pp. 1–6).
- Fitria. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Adl Islamic Economic*, 1(1), 13–28.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134.
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Tri, G. L. (2021). Peran Pemerintah
- Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam

- Junedi, B., Agung, P., Rizal, K. J., Amelia, W., & Nurhasanah, I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Muaradua Melalui Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 4(1), 89–99.
- Kitchenham, B. (2006). *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*.
- Kushandajani. (2015). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Jurnal Yustisia*, 4(2), 369–396.
- Meningkatkan Sektor Usaha Anggota KUB “MULYASARI” Desa Lohgandu, Karanggayam, Kebumen.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). Indonesia. Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1061–1076.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2021).
- Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, Syaparuddin, & Emilia. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 2021.
- Ristiana, R., & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik
- Riyanti, I. N., & Adinugraha, H. H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Jurnal Al-Idarah*, 2(1), 80–93.
- Santifa, M., Warjio, Harahap, D., & Isnanini. (2019). Evaluation of Community Empowerment Program Through Mawar Sejati Waste Bank in Sijambi Village, Datuk Bandar District, Tanjung Balai City. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89–98.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUM Des Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40.
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, S., & Gunawan. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 3(1), 34–43.

- Sugiri, L. (2012). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, 2(1),1–10.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*, 4(2), 1–10.
- Suparmini. (2007). Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Pedesaan. *Geomedia*, 5(2), 1–14.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 101–105.
- Wicaksono, Y. P., Surya, I., & Iskandar, A. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1637–1650.
- Widiyanto, Istiqomah, D., & Yasnanto, A. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra*, 2(1), 26–33.
- Winarni, E. D. (2020). Stategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus Di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan*, 2(1), 1–19.
- Zuhri, M. I., Antikowati, & Rachmad, I. S. (2017). Upaya Pemerintah Desa Dalam Rangka Mamajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). *Lentera Hukum*, 1–1

PROFIL PENULIS

Idah Wahidah, M.H., M.A.P



Penulis lahir di Kabupaten Sumedang pada tanggal 21 September 1991. Pendidikan tingkat dasar hingga menengah dan atas ditempuh di Sumedang. Melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, pendidikan S2 Ilmu Hukum diselesaikan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, sementara pendidikan S2 Administrasi Publik diselesaikannya di Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung. Karier akademisnya diawali menjadi dosen di STIA Cimahi dan AKPARINDO. Sekarang menjadi dosen di Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di luar aktivitasnya mengajar, penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

STRATEGI PENGELOLAAN BUM DESA

BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Membangun desa ke arah yang lebih maju dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pendirian BUM Des yang ditujukan selain guna meningkatkan aktivitas perekonomian desa juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. BUM Des dalam prakteknya harus diorientasikan kepada akomodasi tuntutan masyarakat sehingga keberadaan BUM Des akan menunjang ekonomi masyarakat yang selama ini ada dan menumbuhkan sinergitas antara perekonomian masyarakat dengan usaha yang dijalankan oleh BUM Des. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka BUM Des harus pula menjalankan perannya sebagai unit usaha yang mampu memberdayakan masyarakat di tingkat desa.

Pentingnya pengelolaan BUM Des berbasis kepada pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari kajian dalam buku ini yang mana secara garis besar BUM Des harus menjalankan 2 (dua) perannya sekaligus dan bersamaan. Pertama, BUM Des sebagai unit usaha di tingkat desa yang harus berperan dalam peningkatan perekonomian desa yang diharapkan akan berimplikasi kepada percepatan pembangunan desa yang tengah dilaksanakan. Kedua, BUM Des harus mampu berperan sebagai wadah bagi upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan bidang ekonomi, dengan begitu eksistensi BUM Des tidak hanya mampu membuka lapangan pekerjaan kepada warga masyarakat desa, tetapi juga mampu menjadi inkubator bisnis yang menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan usaha/perekonomian di tingkat desa.

Buku ini diharapkan mampu memberi perspektif baru mengenai eksistensi BUM Des yang ada di desa beserta dengan peranannya sebagai institusi unit usaha dan wadah pemberdayaan masyarakat. Harapannya BUM Des kedepan tidak hanya akan mampu menjadi roda penggerak perekonomian yang mendorong pembangunan desa ke arah yang lebih bagus, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui proses pemberdayaan yang dilakukan.